

KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM: SEJARAH DAN SUMBANGSIH PARA SULTAN BAGI PERADABAN ISLAM DI SUMATERA SELATAN

Muhammad Ilham¹, Ratich Dian Cahyani², Sri Rusgianti³
SMAN Titian Teras H. Abdulrahman Sayoeti, Jambi
SMAN Titian Teras H. Abdulrahman Sayoeti, Jambi
SMAN Titian Teras H. Abdulrahman Sayoeti, Jambi
muhammadilhamratich@gmail.com

ABSTRAK

Kesultanan Palembang Darussalam merupakan suatu institusi politik Islam lokal di Sumatera Selatan. Masa Periode Kerajaan/Kesultanan Palembang Darussalam ini telah bertahan selama 300 tahun lebih. Sejarah wilayah Kesultanan ini dapat dikatakan unik dengan banyaknya tinggalan peradaban Islam yang masih dapat kita lihat sampai sekarang. Di wilayah Sumatera bagian selatan, Kesultanan Palembang Darussalam memiliki peninggalan Islam yang terbanyak bila dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi tetangganya. Artikel ini ingin membahas bagaimana sejarah panjang para sultan Palembang beserta tinggalan-tinggalan peradaban Islam yang diwariskan baik berupa makam, masjid, keraton maupun berbagai macam tinggalan yang lainnya.

Kata Kunci: Sejarah, Sultan Palembang, Peradaban Islam

Pendahuluan

Pulau emas itu adalah nama asli pulau Sumatera yang tertulis dalam sumber-sumber dan catatan-catatan sejarah tradisional dan folklore (cerita-cerita rakyat). Pulau emas dikenal dan disebut beberapa istilah berbeda di wilayah Sumatera (faktor bahasa). “Pulau Ameh” dalam Bahasa Minangkabau, berarti Pulau Emas, kita temui dalam folklore “Cindua Mato” dari Minangkabau. Dalam folklore (cerita rakyat) Lampung tertulis nama “Tanoh Mas” untuk menyebut pulau Sumatera. I-Tsing salah satu tokoh musafir dari Tiongkok (634-713), yang dalam perjalanannya beberapa kali singgah di kerajaan Sriwijaya (Shih-li-fo-shi) pada abad ke-7 M, menyatakan nama Sumatera dengan chin-chou yang berarti “Negeri Emas”¹.

Keberadaan pusat Kedatuan Sriwijaya sampai abad ke 10 Masehi menurut beberapa pendapat di Palembang. Dengan bukti adanya sebuah catatan dari Tiongkok dalam kitab sejarah Dinasti Song (960-1279 M), dalam kitab tersebut menuliskan “Raja San-Bo-Sai (san-fu-ch’i) bertempat tinggal di Chan-pi (Jambi), dan di negeri ini banyak nama orang yang dimulai dengan sebutan Pu”. Dari catatan/berita tersebut, diperkirakan keberadaan bahwa Kedatuan Sriwijaya telah berpindah ke Jambi. Kenapa pusat pemerintahan ini bisa pindah, alasan kepindahannya sampai saat ini belum dapat dipastikan².

Setelah kerajaan Hindu-Budha mengalami kemunduran, perkembangan Islam di wilayah Sumatera pertama kali berkembang di Aceh, dengan institusi politik Islam yang pertama kali muncul ialah Kerajaan Perlak. Perkembangan Islam di Aceh merupakan yang pertama di Asia Tenggara dengan banyak menghasilkan ulama-ulama yang terkenal, seperti

¹ Baambang Budi Utomo, *Atlas Sejarah Islam Indonesia Masa Islam*, (Jakarta: Kemdikbudpar, 2011), hlm. 53.

² *Ibid*, hlm. 53.

Syaikh Abdul Rauf al-Singkili, Syamsuddin as-Sumatrani dan Nuruddin al-Raniri, murid-murid mereka ini lah yang sedikit banyak ikut menyebarkan syiar Islam dan para pedgang dalam pengislaman di wilayah Sumatera.

Wilayah Palembang setelah hijrahnya Raden Fatah dan menjadi sultan dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan Kesultanan Demak, yang mana ayah angkatnya yang bernama Ariodillah/Ariodamar merupakan anak angkat dari Prabu Brawijaya V yang merupakan penguasa Majapahit. Ibu Raden Fatah yang bernama Putri Campa diasingkan oleh Brawijaya V ke Palembang untuk diberikan kepada Ariodillah, Setelah lahir di Palembang dan beranjak dewasa Raden Fatah dikirim ke Jawa dan berguru dengan Sunan Ampel. Raden Fatah menghimpun pasukan untuk melakukan penyerangan ke Majapahit, setelah berhasil maka didirikanlah Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang diberi nama Kesultanan Demak. Raden Fatah diangkat menjadi Sultan pertama dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama, maka secara otomatis wilayah Palembang masuk kedalam wilayah bawahan dari Kesultanan Demak.

Dari sumber dan catatn *Sejarah Melayu*, folklore di Palembang, *Babad Tanah Jawi* maupun dari catatan eropa, Palembang memang memiliki “keunikan” tersendiri, karena Palembang pada masa kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pemerintahan, dianggap memiliki peran besar dalam keruntuhan kerajaan Majapahit, dianggap sebagai cikal bakal Kesultanan Melayu dan juga dianggap sebagai bagian dari berdirinya Kesutanan Melayu-Jawa. Lingkaran budaya Melayu dan budaya Jawa tercermin dalam kehidupan keraton dan masyarakat. Kedua budaya Melayu-Jawa berpengaruh dalam tradisi politik maupun kehidupan masyarakat³.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang tahapannya dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berupa sumber sekunder seperti buku, jurnal dan bahan-banhan yang terkait, tehnik pengumpulan datanya yaitu menelaah dan meneliti secara selektif bahan-bahan yang sesuai dengan yang akan ditulis, data-data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui metode sejarah dan kemudian di historiografikan.

Hasil dan Pembahasan

Palembang pada periode Kesultanan Palembang.

Masa Adipati Aryodillah (1455-1486).

Sejak dibebaskan Cheng-ho pada tahun 1407 situasi Palembang kembali stabil. Dalam masa itu, menurut cerita tutur dan legenda Palembang dikatakan, seseorang yang bernama Mugni diangkat menjadi penguasa di Palembang dengan gelar Sultan, dan mulai membangun kota yang telah hancur itu. Selama beberapa tahun hubungan Palembang dan Majapahit terputus. Hal ini disebabkan karena keadaan Majapahit sendiri sedang terjadi perebutan kekuasaan. Sebagai daerah bawahannya, Palembang kurang mendapat perhatian. Kemudian

³ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 7.

ketika Majapahit dipegang oleh Raja Brawijaya, Palembang mulai diperhatikan lagi. Pada tahun 1445 Raja Brawijaya Kertabumi kemudian mengirimkan Ariodillah ke Palembang untuk menjadi raja muda Majapahit⁴.

Sebelum Aryodillah memerintah Palembang, di Majapahit kembali terjadi kekacauan. Banyak kota-kota pesisir dan bandar-bandar dagang yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1455 Sultan Mugni yang telah tua kemudian mengangkat Aryodillah menjadi penguasa Palembang. Ia memerintah Palembang sampai tahun 1486⁵. Menurut Faile dalam Retno Purwati⁶, mengatakan dalam masa pemerintahannya, Aryodillah bertindak sewenang-wenang sehingga diusir ke Jawa dan meninggal di Cirebon.

Dengan terusirnya Ariodillah dari Palembang maka yang menjadi penguasa di Palembang adalah Dipati Karangwidara yang masih samar-samar kapan dimulai pemerintahannya di Palembang. Sampai dengan saat ini tidak ditemukan literatur yang menjelaskan bagaimana masa pemerintahan Dipati ini di Palembang.

Masa Pangeran Sido ing Lautan (1547-1552).

Setelah sekian puluh tahun pasca kematian Adipati Aryodillah dan Depati Karangwidara, Raden Fatah yang ketika itu menjadi Sultan Demak mengutus Pangeran Sido ing Lautan untuk berkuasa di Palembang. Belum sampai ditujuannya, pangeran ini mati terbunuh dalam pertempuran laut melawan Portugis di Selat Malaka⁷.

Masa Ki Gede ing Suro Tuo (1552-1573).

Dari sekian banyak pengikut Aria Penangsang, ada seorang pengikutnya yang menyingkir ke Palembang, yaitu Ki Gede ing Suro Tuo. Ia menyingkir ke Palembang dengan membawa panji-panji kebesaran Jipang pada tahun 1552. Ki Gede ing Suro Tuo adalah pimpinan para bangsawan pengikut Aria Penangsang. Dari nama dan gelarnya dapat diketahui setidaknya dia adalah seseorang yang suro yang berarti "seorang yang gagah berani, bersifat kesatria, dan laki-laki perkasa". Sedangkan Ki Gede menunjukkan seseorang yang berasal dari kalangan biasa yang menjadi pemimpin dilingkungan masyarakatnya⁸.

Setelah 17 tahun memerintah, Ki Gede ing Suro Tuo merasa kedudukannya harus ada yang menggantikan. Sementara itu ia tidak mempunyai putra, ia kemudian memanggil salah seorang keponakannya untuk diangkat menjadi putra mahkota. Keponakannya itu memerintah Palembang dengan gelar Ki Gede ing Suro Mudo⁹.

⁴ Baambang Budi Utomo, *Atlas Sejarah Islam Indonesia Masa Islam*, (Jakarta: Kemdikbudpar, 2011), hlm. 54.

⁵ Djohan Hanafiah, "*Dari Kerajaan Sriwijaya Sampai Kesultanan Palembang, Melacak Warisan Sejarah dan Budaya Masyarakat Palembang*", (Palembang: Kuliah Umum, 2005), hlm. 21.

⁶ Retno Purwati, "*Konflik Elit Politik Pada Masa Kerajaan dan Kesultanan Palembang*". Siddhayatra No. 1 Vol. 9, 2004, (20-39), hlm. 25.

⁷ Baambang Budi Utomo, *Atlas Sejarah Islam Indonesia Masa Islam*, (Jakarta: Kemdikbudpar, 2011), hlm. 54.

⁸ *Ibid*, hlm. 55.

⁹ Djohan Hanafiah, "*Dari Kerajaan Sriwijaya Sampai Kesultanan Palembang, Melacak Warisan Sejarah dan Budaya Masyarakat Palembang*", (Palembang: Kuliah Umum, 2005), hlm. 26.

Keraton pertama yang didirikan oleh Ki Gede ing Suro Tuo adalah Keraton Kuto Gawang. Sebuah keraton setidaknya telah berdiri 100 tahun, sebelum dibakar habis oleh VOC tahun 1659. Keraton Kuto Gawang berbentuk persegi, dikelilingi kayu besi dan unglan 4 persegi dengan ketebalan 30x30 cm. Panjang dan lebar benteng ini berukuran 290 *Rijnlandsche roede* (1093 meter), tinggi dinding temboknya adalah 24 kaki atau kurang lebih 7,25 meter. Benteng ini menghadap ke Sungai Musi, dengan pintu masuk melalui Sungai Rengas, sedangkan kanan dan kiri benteng dibatasi oleh Sungai Buah dan Sungai Taligawe¹⁰.

Masa Ki Gede ing Suro Mudo (1573-1590).

Tokoh ini memerintah Palembang selama 17 tahun. Pada masa Ki Gede ing Suro Mudo inilah diperkirakan terjadi pembangunan kompleks pemakaman Gendingsuro. Wilayah tempat dimana bangunan-bangunan Gendingsuro berdiri dikenal dengan nama Palembang Lamo. Wilayah ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pemukiman kerajaan yang bercorak Islam pertama di Palembang. Bangunan-bangunan bata yang terdapat pada situs Gendingsuro sebetulnya merupakan runtuhannya bangunan candi zaman Majapahit (Abad ke 14-16). Pada masa Islam bangunan ini dialihfungsikan menjadi kompleks pemakaman para pendiri kerajaan Palembang¹¹. Sekitar tahun 1575 Ki Gede ing Suro Mudo mangkat dan dimakamkan di 1-Iilir Palembang.

Masa Ki Mas Adipati (1590-1595).

Ki Mas Adipati memerintah pada tahun 1590 hingga 1595. Ia mempunyai empat orang putra dan seorang putri. Kimas Adipati kemudian digantikan oleh puteranya Den Arya sebagai pewaris tahta, namun kekuasaannya tidak berlangsung lama. Den Arya terbunuh karena kelakuannya yang kurang baik, ia lalu digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Madi ing Angsoko¹².

Masa Pangeran Madi ing Angsoko (1595-1629).

Pemerintahan Pangeran Madi ing Angsoko ini sangat lama sekitar 34-35 tahun. Pada masa pemerintahan Pangeran Madi ing Angsoko ini telah terjadi perang “kafir” dengan Banten, namun Pangeran Madi ing Angsoko berhasil mengatasinya. Hal ini ditandai dengan kemenangan di pihak Palembang dalam perang melawan Banten tersebut. Setelah penyerangan Banten tampaknya kondisi Kerajaan Palembang relatif stabil, sehingga terjadilah kontak dagang pertama dengan VOC¹³.

Hubungan antara Kerajaan Palembang dan VOC telah mulai sejak tahun 1616. Hubungan ini dimulai ketika perwakilan VOC di Jambi, Andries Soury mengirimkan hadiah kepada raja Palembang (Pangeran Madi ing Angsoko) melalui utusan Palembang yang

¹⁰ Djohan Hanafiah, *Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Sumatera Selatan*. (Palembang: Balai Arkeologi Palembang, 2007), hlm. 62.

¹¹ Djohan Hanafiah, “*Dari Kerajaan Sriwijaya Sampai Kesultanan Palembang, Melacak Warisan Sejarah dan Budaya Masyarakat Palembang*”, (Palembang: Kuliah Umum, 2005), hlm 23

¹² Baambang Budi Utomo, *Atlas Sejarah Islam Indonesia Masa Islam*, (Jakarta: Kemdikbudpar, 2011), hlm. 56.

¹³ Retno Purwanti, “*Konflik Elit Politik Pada Masa Kerajaan dan Kesultanan Palembang*”. Siddhayatra No. 1 Vol. 9, 2004, (20-39), hlm. 26.

bertugas ke Jambi. Pada kesempatan tersebut disampaikan harapan terjalinnya hubungan dagang antara Kerajaan Palembang dan VOC. Kemudian pada tahun 1617, VOC mengirim Crijn van Reamburch yang didampingi Andries Soury berunding ke Palembang. Mereka diterima oleh Pangeran Madi ing Angsoko dan Raja Bangka yang merupakan mertua Pangeran Madi ing Angsoko. Dalam pertemuan tersebut VOC menyatakan keinginannya untuk membeli barang-barang dari Kerajaan Palembang berupa kemenyan, getah pohon berwarna, lilin, gading gajah, lada dan kayu¹⁴.

Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Muhammad (1572-1627), penguasa Kesultanan Banten ini berusaha memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Kerajaan Palembang. Menurut Sultan Maulana Muhammad, Kerajaan Palembang sangat maju sehingga menjadi saingan dari Kesultanan Banten, terutama dalam perdagangan lada. Ketika Sultan Maulana Muhammad menyerang Kerajaan Palembang, ia gugur terkena peluru dan tentara Banten terpaksa kembali pulang¹⁵.

Masa Pangeran Madi Alit (1629-1630).

Ketika Pangeran Madi ing Angsoko wafat terjadi perebutan kekuasaan antara menantu (Pangeran Jambi) dengan dua paman istrinya (saudara Pangeran Madi ing Angsoko), dan peperangan internal tersebut dimenangkan oleh pihak paman dari Pangeran Madi ing Angsoko. Maka yang menjadi penguasa di Kerajaan Palembang adalah Pangeran Madi Alit yang disebut dengan Raja Depati (1629-1630). Pangeran Madi Ait hanya berkuasa selama satu tahun dan beliau mati terbunuh dikarenakan perkara wanita¹⁶.

Masa Pangeran Sido ing Puro (1630-1639).

Pangeran Madi Alit kemudian digantikan dengan saudaranya Pangeran Sido ing Puro atau juga disebut dengan Pangeran Made Soka yang dikenal dengan nama Raden Aria yang memerintah sekitar tahun 1630-1639. Masa kekuasaan Raden Aria yang hanya tujuh tahun terhitung singkat, tetapi mengingat sebutannya Pangeran Siso ing Puro (artinya meninggal di keratin atau puro), maka kematiannya kemungkinan disebabkan karena beliau wafat pada masa masih menjabat sebagai raja di Palembang¹⁷.

Kebijakan politik yang dijalankan oleh Pangeran Sido ing Puro ialah semasa Gubernur Jendral Jacques Speck (1629-1632) dan menghasilkan hubungan dagang serta izin mendirikan loji dagang dekat *dalem* (istana) Batu Ampar pada tahun 1630. Hubungan Palembang dan VOC menjadi lebih penting, ketika hubungan Kerajaan Palembang dengan Kerajaan Jambi dan Kesultanan Mataram menjadi kurang akrab, karena persaingan dalam hubungan “sekutu” dan “seteru” ataupun karena saling ingin menjadi “*overlord*”. Dalam situasi demikian Kerajaan Palembang merasa perlu bersahabat dengan VOC untuk menghadapi Kerajaan Jambi ataupun Kesultanan Mataram. Keadaan yang demikian ini

¹⁴ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 70.

¹⁵ Baambang Budi Utomo, *Atlas Sejarah Islam Indonesia Masa Islam*, (Jakarta: Kemdikbudpar, 2011), hlm. 73.

¹⁶ P. De Roo La Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, (Jakarta: Bhratara, 1971), hlm. 14.

¹⁷ Retno Purwanti, “*Konflik Elit Politik Pada Masa Kerajaan dan Kesultanan Palembang*”. Siddhayatra No. 1 Vol. 9, 2004, (20-39), hlm. 26.

memang dikehendaki oleh VOC, sehingga berbagai keinginan VOC dapat dipenuhi oleh Kerajaan Palembang. Semenjak 1637, Kapten Soury pernah beberapa kali datang ke Kerajaan Palembang dan pada tahun 1638 ia ditunjuk sebagai *opperkoopman* di Loji dagang Palembang bersama wakilnya Jeremias van Vlied¹⁸.

Masa Pangeran Sido ing Kenayan (1639-1650).

Raden Aria kemudian digantikan oleh saudaranya Pangeran Sido ing Kenayan yang memerintah 1639-1650. Istri Pangeran Sido ing Kenaya adalah Ratu Sinuhun yang sangat terkenal di masyarakat Palembang. Pada masa pemerintahan Pangeran Sido ing Kenayan tampaknya kondisi keamanan dan politik waktu itu relatif stabil, sehingga dapat memerintah selama kurun waktu 16 tahun. Hal ini didukung dengan keluarnya “Undang-undang Simbur Cahaya”, yang oleh masyarakat Palembang diyakini merupakan buah karya dari Ratu Sinuhun¹⁹.

Ketika Pangeran Sido ing Kenayan tengah dalam perjalanan pulang dari Kesultanan Mataram pada 5 Oktober 1642 dengan diantar oleh armada perang Kesultanan Mataram, mereka diserang dan dihancurkan oleh armada Jeremias van Vlied yang dikirimkan oleh VOC. Kejadian ini menghilangkan kepercayaan pengamanan Pangeran Sido ing Kenayan terhadap Kesultanan Mataram dan Pangeran Sido ing Kenayan langsung berbalik memihak VOC dengan menandatangani perjanjian yang dikenal dengan kontrak 20 Oktober 1642. Penandatanganan kontrak ini lebih didasarkan rasa takut Kerajaan Palembang bukan atas dasar persahabatan, lebih-lebih perjanjian ini ditandatangani diatas kapal perang VOC *Luijpaerdts*, ketika Pangeran Sido ing Kenayan tengah berada diatas perairan Sungai Musi menuju Palembang²⁰.

Sebenarnya Pangeran Sido ing Kenayan tidak suka berkerjasama dengan VOC. Oleh karena itu berbagai usahatelah dilakukan oleh Pangeran Sido ing Kenayan untuk tidak memenuhi isi kontrak tersebut dan akhirnya pada tahun 1647 harga lada dinaikkan dengan cukup tinggi, sehingga VOC tidak memperoleh keuntungan lagi dari monopolinya. Sikap Pangeran Sido ing Kenayan ini menimbulkan ketidaksenangan VOC terhadap Kerajaan Palembang, ditambah lagi ketika itu persaingan dengan para pedagang Eropa lainnya semakin meningkat²¹.

Masa Pangeran Sido ing Pasarean (1651-1652).

Setelah Pangeran Sido ing Kenayan wafat ia digantikan oleh kemenakan Ratu Sinuhun yaitu Pangeran Sido ing Pasarean. jika melihat julukannya Pangeran Sido ing

¹⁸ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 71.

¹⁹ Retno Purwanti, “Konflik Elit Politik Pada Masa Kerajaan dan Kesultanan Palembang”. *Siddhayatra* No. 1 Vol. 9, 2004 (20-39), hlm. 26.

²⁰ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 72.

²¹ *Ibid*, hlm. 85.

Pasarean (artinya pangeran yang meninggal di pasarean=tempat tidur). Maka masa kekuasaan yang singkat tersebut disebabkan karena meninggal secara mendadak²².

Masa Pangeran Sido ing Rajek (1652-1659).

Pada masa pemerintahan Pangeran Sido ing Rajek ini, dimulailah hubungan resmi dengan VOC. Seiring berjalannya waktu terjadi berbagai macam konflik kecil yang menyebabkan hubungan perdagangan antara Palembang dan VOC sudah tidak saling percaya lagi. Beberapa tindakan kasar pedagang VOC dalam mendapatkan lada di perairan Sungai Musi, telah mengakibatkan meluasnyaketidaksenangan dengan pihak VOC. VOC pernah juga mengirimkan armada ke Kerajaan Palembang dan merampas lada-lada yang berlabuh di pinggiran ibukota, sebagai balasan maka ditahun 1657 dua kapal VOC ditangkap oleh Pangeran Sido ing Rajek. Menghadapi sikap penguasa Palembang ini, maka Batavia mengirimkan armada dibawah pimpinan Jhon van der Lain pada tahun 1659. Pertempuran sengit terjadi di Muara Plaju dan Pulau Kemaro²³.

Kekuatan Keraton Kuto Gawang ditopang oleh suatu sistem perbentengan dan kubu yang ada dibagian Ilir Musi, yaitu Benteng Bamagangan, di muara Sungai Komering. Benteng kedua adalah Benteng Mertapura di daerah sekitar 16 Ulu, dan terakhir adalah Benteng Pulau Kemaro yang letaknya dekat dengan Keraton Kuto Gawang. Ketiga benteng tersebut letaknya didepan Keraton Kuto Gawang. Penempatannya didasarkan atas pemikiran bahwa musuh yang akan datang menyerang melalui Sungai Musi dan Sungai Komering. Benteng Bamagangan, Benteng Martapura dan Benteng Pulau Kemaro masing-masing dipersenjatai meriam yang jumlahnya tidak sama. Senjata Meriam di Benteng Bamagangan sebanyak 24 pucuk, Benteng Martapura 9 pucuk, dan Benteng Pulau Kemaro 14 pucuk. Keraton Kuto Gawang sendiri diperkuat oleh meriam sebanyak 18 pucuk²⁴.

Berdasarkan cerita yang ditulis oleh Johan Nieuhof dalam Anthony Reid, latar belakang VOC menyerang Kerajaan Palembang waktu itu adalah *“beberapa tahun yang lalu, salah satu kota terpenting di Sumatra yakni Palembang yang terletak di pesisir bagian barat Sumatera, dibumihanguskan oleh seorang laksamana sekaligus jendral Belanda Johan van der Lain, pada 24 November 1659, karena sekitar dua tahun sebelumnya penduduk setempat membunuh seluruh awak kapal Belanda Jakkatra dan Wachman, dan setahun kemudian membunuh lagi dua orang Belanda yang saat itu diutus kedarat oleh kapal perang Niccoport dan Leedam untuk menjadi penerjemah, kepala keduanya ditancapkan ke ujung tombak atas perintah orang kaya, lalu sengaja dipertontonkan kepada rekan-rekan di kapal”*²⁵.

Dilanjutkan oleh Nieuhof, *“untuk membalas perbuatan keji tersebut, sebelas armada kapal diberangkatkan dari Batavia pada 19 Oktober 1659 dibawah komando Laksamana*

²² Retno Purwanti, *“Konflik Elit Politik Pada Masa Kerajaan dan Kesultanan Palembang”*. Siddhayatra No. 1 Vol. 9, 2004 (20-39), hlm. 26.

²³ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 74.

²⁴ Baambang Budi Utomo, *Atlas Sejarah Islam Indonesia Masa Islam*, (Jakarta: Kemdikbudpar, 2011), hlm. 57-58.

²⁵ Anthony Reid, *Sumatera Tempo Dulu, Dari Marcopolo Sampai Tan Malaka*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 148.

Jhon van der Lain beserta wakilnya Jhon Truytsman; armada tersebut terdiri dari kapal inti bernama Orange, Postilion, Molucco, Arms of Batavia, dan Charles; tiga kapal galiung, yaitu Appelboom, Hourglass, dan Hammehil; serta tiga kapal lainnya yaitu, Crab, Tronk, dan Flaying Dear, dilengkapi dengan 600 pelaut dan 700 prajurit darat. Mereka tiba pada 30 November 1659 di Sungai Palembang tanpa mengalami gangguan berarti selama perjalanan²⁶.

Armada VOC maju terus masuk ke ibu kota Kerajaan Palembang dan membakari rumah-rumah penduduk. Disekitar istana mereka menemukan teman-temannya yang ditawan dalam keadaan mati semua. Keraton Kuto Gawang menjadi lautan api dan Pangeran Sido ing Rajek mundur ke Dusun Indralaya. Dalam perang ini baik Loji dagang VOC dan Keraton Kuto Gawang semuanya hangus terbakar. Karena peperangan ini, Pangeran Sido ing Rajek tidak mau kembali lagi ke Palembang²⁷.

Palembang pada periode Kesultanan Palembang

Masa Ki Mas Hindi/Pangeran Ario Kesumo Abdulrohim Sultan Abdulrrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam (1659-1706).

Perang Palembang I berakhir tahun 1659, Keraton Kuto Gawang yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Palembang berhasil dihancurkan oleh VOC. Sedangkan Pangeran Sido ing Rajek menyingkir ke Dusun Sakatiga (Indralaya) dan meninggal disana. Kerajaan Palembang kehilangan pemimpinnya yang berani bersikap tegas kepada VOC. Dalam situasi yang demikian Kerajaan Palembang membutuhkan figure seorang pemimpin yang dapat diterima oleh masyarakat Palembang dan juga VOC di Batavia. Dalam hal ini maka Ki Mas Hindi adik dari Pangeran Sido ing Rajek dipandang dapat memenuhi persyaratan tersebut. Pihak VOC kemudian atas saran dari Raja Jambi menyetujui Ki Mas Hindi sebagai raja di Kerajaan Palembang²⁸.

Dalam rangka menegakkan kembali eksistensi Palembang, maka Ki Mas Hindi sebagai penguasa baru, memindahkan pusat pemerintahan dari Keraton Kuto Gawang ke keraton baru di Beringin Janggut²⁹. Berdasarkan pandangan sistemik, Keraton Beringin Janggut merupakan suatu system kota yang terdiri dari sejumlah sub system yaitu perkampungan. Semua sub sistem ini diikat oleh satu sistem berbentuk kekuasaan politik atau mungkin sekali kekuasaan politik dan ekonomi. Berdasarkan data toponim pada nama kampung yang masih ada, ibukota Kesultanan Palembang di Beringin Janggut dapat dikalisifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu a. pengelompokan atas dasar pekerjaan, b. atas dasar ras dan suku, c. atas dasar status dalam pemerintahan dan masyarakat³⁰.

²⁶ *Ibid*, hlm. 148.

²⁷ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 74.

²⁸ Syafruddin Yusuf, *"Kesultanan Palembang Darussalam (Dalam Tinjauan Sejarah Politik)"*. (Indralaya: Dalam Orasi Ilmiah, 2006), hlm. 6.

²⁹ *Ibid*, hlm. 6.

³⁰ Djohan Hanafiah, *"Dari Kerajaan Sriwijaya Sampai Kesultanan Palembang, Melacak Warisan Sejarah dan Budaya Masyarakat Palembang"*. (Palembang: Kuliah Umum, 2005), hlm. 32.

Pada tahun 1675, Ki Mas Hindi memakai gelar Sultan. Pemakaian gelar ini adalah untuk pertama kali bagi penguasa Palembang. Pemakaian gelar ini secara politis menunjukkan bahwa status Ki Mas Hindi setara dengan penguasa Kesultanan Mataram yakni sebagai raja dan sekaligus sebagai pernyataan bahwa Kerajaan Palembang berdiri sebagai Kesultanan yang merdeka yang lepas dari penguasa Kesultanan Mataram. Adapun gelar yang dipakai oleh Ki Mas Hindi adalah Pangeran Ario Kesumo Abdurrohman Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Sering juga disebut Susuhunan Cinde welan³¹.

Untuk memperkuat posisi VOC, maka ditahun 1662 diadakan pembaharuan kontrak tahun 1642. Dalam perjanjian itu kepada VOC diizinkan kembali membangun loji dan gudang ditempat yang cukup baik dan dekat sungai. Loji ini dikenal sebagai Loji Sungai Aur yang berhadapan dengan Keraton Beringin Janggut³². Dalam perjanjian ini di tentukan pula bahwa *“tidak boleh ada rumah disekitar 50 depa dari loji dan gudang; Palembang akan membela orang dan barang Kompeni; kapal kompeni berdagang di Palembang; Orang Kaya Palembang tidak akan merampas warga Kompeni Belanda; Palembang tidak akan memaksa Kompeni untuk memberikan pakian sebagai syarat penjualan lada kepada Kompeni; monopoli lada bagi Kompeni dan harga lada per pikul 4,5 real; budak atau orang Belanda yang lari kepada orang Palembang akan dikembalikan kepada Kompeni; pemberian hukuman terhadap warga Kompeni dan warga pangeran diserahkan pada masing-masing pihak; Residen (perwakilan Kompeni di Palembang) akan bertindak sebagai kuasa Kompeni”*³³.

Sejak kontrak 1662 ini hubungan Kesultanan Palembang dan VOC tampak berjalan baik dan menguntungkan VOC, karena banyak lada diberikan oleh Kesultanan Palembang. Pada tahun 1678, VOC ingin merubah harga patokan lada yang telah ditetapkan dengan menurunkannya 1 rijksdaalder (2,5 f) perpikul. Juga ditemukan kasus penyelewengan oleh pegawai VOC yang mengelola perdagangan di Palembang. Untuk melaksanakan keinginan tersebut, VOC mengirim Jhon van der Lain ke Keraton Beringin Janggut untuk menandatangani kontrak baru dengan sultan Palembang. Dengan ketentuan harga jual lada yang diturunkan kemudian prosedur penimbangan yang hanya dibolehkan di siang hari ditambah dengan boleh mengirimkan lada ke Batavia dengan batas yang ditentukan dan gubernur jendral boleh membuat tempat peristirahatan di Palembang tetapi tidak boleh berukuran besar³⁴.

Ketika hubungan antara Kesultanan Palembang dan Kesultanan Jambi menjadi buruk, karena perselisihan, maka pada tanggal 10 April 1681, Sultan Abdurrahman mengirim utusan ke Batavia untuk meminta bantuan VOC melawan Sultan Jambi. Permintaan tersebut dikabulkan VOC dengan syarat biaya ekspedisi ditanggung oleh Palembang. VOC mengirimkan ekspedisi kecil ke Jambi pada tanggal 26 April 1681 dibawah pimpinan

³¹ Syafruddin Yusuf, *“Kesultanan Palembang Darussalam (Dalam Tinjauan Sejarah Politik)”*, (Indralaya: Orasi Ilmiah), hlm. 6.

³² Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 74.

³³ Katalog Palembang, No. 41.6 Renovasi de Contracten met de Koningen van Palembang dee 1622, 1678, 1679, en 1684 det 25 Januari 1691.

³⁴ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 75.

Francois Tack. Ekspedisi ini berhasil memaksa sultan Jambi dan pasukannya mundur. Sebagai imbalan atas keberhasilan ekspedisi itu, maka VOC mengajukan kontrak baru untuk ditanda tangani. Kontrak ini ditanda tangani tanggal 19 Mei 1681. Pihak Palembang diwakili oleh Pangeran Depati dan Pangeran Mangkubumi, sedangkan pihak VOC diwakili oleh Francois Tack, yang dibahas ialah biaya ekspedisi yang ditanggung sebesar 5000 rijksdaalder sebulan, dan boleh berupa uang atau lada sebagai pembayarannya, mengembalikan orang Bugis-Makassar serta budak-budak yang lari dan semua pedagang asing ada dibawah tanggungjawab VOC dan pedagang-pedagang Minangkabau berada dibawah tanggung jawab Sultan³⁵.

Masa Sultan Muhammad Mansyur Jayo ing Lago (1706-1714).

Setelah meninggalnya Sultan Abdulrahman, Kesultanan Palembang di perintah oleh Sultan Muhammad Mansyur Jayo ing Lago. Selama delapan tahun pemerintahannya Sultan Muhammad Mansyur disibukkan oleh pergolakan didalam lingkungan keluarga sultan. Beliau lebih banyak menghadapi tantangan dari keluarga sultan. Salah satu penyebabnya adalah masalah penunjukkan dan pengangkatannya sebagai sultan oleh Sultan Abdulrahman. Sultan Muhammad Mansyur bukanlah putra pertama dari Ratu Agung (permaisuri Sultan Abdulrahman), tapi ia adalah putra yang kedua. Tampaknya kesuksesan Sultan Muhammad Mansyur memimpin pasukan Palembang yang dibantukan pada penguasa Jambi dalam mengatasi pemberontakan di Hulu Jambi menjadi pertimbangan Sultan Abdulrahman untuk mempercayakan calon penggantinya kepada Muhammad Mansyur bukan kepada putra mahkota Pangeran Adipati ing Sepuh³⁶.

Sultan Muhammad Mansyur menyadari bahwa konflik internal yang terjadi pada masa pemerintahannya akan semakin berkembang jika tidak ditunjuk calon pengganti sebelum ia meninggal. Oleh karena itu, ia kemudian menetapkan anaknya dari permaisuri Ratu Pamekas yang bernama Raden Abubakar sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu Purboyo. Penunjukkan Raden Abubakar sebagai putra mahkota, menunjukkan bahwa Sultan Muhammad Mansyur ingin mengembalikan tradisi dalam pengangkatan putra mahkota. Namun sayangnya, putra mahkota ini tewas sebelum sempat memegang jabatannya akibat pengkhianatan sekelompok kerabat sultan yang tidak menunggunya berkuasa. Pembunuhan terhadap Pangeran Ratu Purboyo, membuat Sultan Muhammad Mansyur harus mencari penggantinya. Akhirnya beliau menunjuk anaknya dari istrinya Nyai Mas Ratu Senguk yang bernama Raden Lambu sebagai putra mahkota. Oleh karena Raden Lambu belum dewasa, maka Sultan Muhammad Mansyur mengangkat adiknya yang bernama Raden Uju sebagai wali kerajaan³⁷.

Masa Sultan Agung Komaruddin Sri Truno (1714-1724).

Pada tahun 1714, Sultan Muhammad Mansyur Jayo ing Lago meninggal dunia. Kedudukannya digantikan oleh adik sultan yaitu Raden Uju dengan gelar Sultan Agung

³⁵ *Ibid*, hlm. 76.

³⁶ Syafruddin Yusuf, *"Kesultanan Palembang Darussalam (Dalam Tinjauan Sejarah Politik)"*, (Indralaya: Orasi Ilmiah), hlm .09.

³⁷ *Ibid*, hlm. 09.

Komaruddin Sri Truno. Naiknya Raden Uju (Sultan Agung Komaruddin) menyebabkan kesultanan dilanda konflik internal. Selama pemerintahannya ia menghadapi paling tidak tiga kelompok yang tidak menyukainya yaitu pertama kelompok Pangeran Ratu Purboyo; kedua, kelompok Raden Lambu dan kakaknya Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali; dan ketiga, kelompok Pangeran Dipo Kusumo (keturunan Pangeran Sido ing Rajek). Masing-masing kelompok berusaha untuk merebut kekuasaan sebagai orang nomor satu di Kesultanan Palembang³⁸.

Kemelut dalam istana berupa proses pergantian sultan mengundang lagi campur tangan Belanda. Ketika semakin memuncak perselisihan antara Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali dengan adiknya Raden Lambu Pangeran Ratu Jayo Wikramo tentang siapa yang paling berhak menjadi sultan, maka VOC atas permintaan Sultan Komaruddin mengirim suatu ekspedisi dibawah pimpinan Willem Daams. Ekspedisi ini berhasil mengusir Pangeran Mangkubumi dan memperkuat posisi Raden Lambu sebagai calon pengganti sultan³⁹. Sebagai imbalan atas bantuan tersebut Sultan Komaruddin terpaksa menandatangani kontrak baru tanggal 02 Juni 1722⁴⁰ yang berisi kesanggupan pembayaran kembali biaya-biaya yang menjadi kewajiban Sultan Palembang. Keuntungan lainnya VOC berhasil mengirimkan 5 kapal yang membawa muatan seharga 600.000 ringgit dan 200.000 real Spanyol ke Negeri Belanda⁴¹.

Dari ketiga kelompok tersebut yang posisinya lebih kuat dan banyak mendapatkan dukungan untuk menggantikan Sultan Komaruddin adalah kelompok Raden Lambu. Dalam rangka mengatasi konflik tersebut, maka Sultan Komaruddin mengadakan musyawarah keluarga sultan. Hasil musyawarah tersebut memutuskan bahwa sultan mengangkat Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali sebagai raja dengan gelar Sultan Anom Muhammad Alimuddin dan berkuasa atas dari Sungai Tengkuruk ke sebelah hulu. Raden Lambu diangkat menjadi putera mahkota dengan gelar Pangeran Ratu Jayo Wikramo dengan wilayah Sungai Tengkuruk ke sebelah hilir. Sedangkan Sultan Komaruddin mengundurkan diri dari jabatannya dan dijadikan sesepuh dengan gelar Sultan Agung. Karena itu sering disebut juga dengan Sultan Agung Komaruddin Sri Truno. Untuk lebih memperkuat kedudukan Raden Lambu, maka Sultan Agung Komaruddin Sri Truno menikahkan putrinya yang bernama Raden Ayu Senguk dengan Raden Lambu. Setelah pernikahan ini Sultan Agung Komaruddin Sri Truno mengundurkan diri dan mengangkat Raden Lambu sebagai penggantinya dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo yang sering disebut Sultan Mahmud Badaruddin I. sedangkan Raden Ayu Senguk diberi gelar Ratu Gading⁴².

³⁸ *Ibid*, hlm. 10.

³⁹ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 76.

⁴⁰ Katalog Palembang, No. 41.7 Renover de Contracten met Sultan Seri Ratu Palembang 2 Juni 1722.

⁴¹ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 77.

⁴² Syafruddin Yusuf, *"Kesultanan Palembang Darussalam (Dalam Tinjauan Sejarah Politik)"*. (Indralaya: Orasi Ilmiah, 2006), hlm. 9-10.

Masa Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758).

Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo memegang kekuasaan selama 34 tahun. Pengangkatan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo sebagai sultan Palembang, menimbulkan rasa iri dari saudaranya yaitu Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali, yang juga merasa mempunyai hak atas kerajaan karena ia adalah anak tertua. Permusuhan ini berkembang menjadi perang saudara yang banyak memakan korban. Menyadari hal ini Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali, kemudian mengundurkan diri ke Jambi. Pada tahun 1727 Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali di bunuh oleh utusan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo. Konflik juga terjadi dengan keturunan Raden Abubakar Pangeran Ratu Purboyo. Namun konflik ini dapat diselesaikan melalui jalan perundingan. Raden Lumbuk putra Pangeran Purboyo diangkat oleh sultan sebagai Pangeran Natodirajo dan Kepala Manco Empat⁴³.

Ketika terjadi beberapa penyelundupan lada dan timah kepada pihak EIC, dimana terlibat beberapa pegawai VOC dan campur tangan komisaris VOC di Palembang terhadap keruwetan yang terjadi di keraton dengan sikap kurang sopan, keadaan ini telah menimbulkan ketidak senangan yang tidak tertahankan terhadap VOC, sehingga kebun-kebun lada didaerah uluan hampir semuanya dihancurkan oleh pemiliknya sendiri, sebagai bentuk protes terhadap campur tangan VOC di Palembang. Pada tanggal 15 Juli 1755, diangkatlah Johannes Andreas Paravicini sebagai *expressen comissaris Palembang* untuk mengatasi kemelut di Palembang dan mengadakan kontrak baru dengan Sultan Mahmud Badaruddin jayo Wikramo⁴⁴.

Kontrak baru yang diajukan oleh Pravicini ialah “*memperkuat kembali persahabatan antara kompeni dan sultan atas dasar kontrak-kontrak sebelumnya dan memperbarui kontrak 02 Juni 1722; Kompeni memegang monopoli lada dan timah dari kepulauan Bangka dan Belitung; penyelundupan tidak disenangi Kompeni; sultan harus menyediakan lada 30.000 pikul pertahun kepada kompeni*”⁴⁵ kontrak ini ditandatangani oleh Paravicini dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo tanggal 10 September 1755.

Pada awal masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddi Jayo Wikramo memerintahkan pembangunan makam. Bangunan ini merupakan bangunan batu pertama yang dibuatnya, sebelum memerintahkan pembangunan Benteng Kuto Batu dan Masjid Agung. Mengenai tahun pembuatannya diperkirakan pada sekitar tahun 1728. Komplek makam ini dikelilingi pagar tembok bata dengan gapura gerbang masuknya terletak di sisi selatan menghadap kearah Sungai Musi. Menurut kesaksian William Marsden⁴⁶, “*Tempat pemakaman para penguasa terletak di Palembang kuno, sekitar satu league kearah hilir sungai. Tanah ditempat tersebut terlihat lebih tinggi karena sejak lama menjadi lokasi pemukiman*”.

Beberapa tinggalan kebesaran dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo di Palembang adalah Benteng Kuto Batu. Bangunan ini merupakan bangunan keraton yang

⁴³ *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁴ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 77.

⁴⁵ Katalog Palembang, No. 41.8 Contrac Palembang 10 September 1755

⁴⁶ William Marseden, *Sejarah Sumatera*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 433.

dikelilingi oleh tembok dari batu dengan pintu gerbang kokoh yang menghadap ke Sungai Musi. Bangunan keraton ini dibangun atas perintah Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo yang peresmian pemakaiannya dilakukan pada tanggal 17 September 1737 setelah lebih dari 10 tahun memegang tampuk pemerintahan di Palembang⁴⁷.

Mengenai gambaran Benteng Kuto Batu ini sendiri ada orang Eropa yang melukiskannya yaitu William Marsden yang memberikan deskripsi *“Dalem atau istana dikelilingi oleh dinding tembok yang tinggi, tak seorang Eropa pun tahu tentang bagian dalamnya, dan tampaknya dalam keadaan besar, mengaggumkan dan banyak sekali ornament di bagian luarnya. Tidak jauh dari dinding kuto, dibagian yang lebih rendah terdapat battery yang ditempatkan pada sebuah bangunan kokoh beratap berbentuk segi empat mengawasi sungai. Lebih ke bawah lagi dari dinding ini, juga terdapat Meriam-meriam yang terpasang, ditembakkan pada saat-saat khusus. Diantara jarak kedua battery terlihat meidan atau lapangan, pada bagian ujung tampak balairung atau ruangan tempat sultan bertatap muka dengan rakyatnya. Gedung ini bentuknya biasa saja, kadangkala dipakai sebagai gudang, tetapi dihiasi dengan senjata-senjata diseluruh dindingnya”*⁴⁸.

Kemudian Masjid Agung, masjid ini merupakan bangunan kokoh yang dibuat dari batu dibangun atas perintah Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo yang peresmian peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 01 Jumadil Akhir 1151 H dan peresmian pemakaiannya dilakukan pada tanggal 28 Jumadil Awal 1151 H (26 Mei 1748). Masjid ini pada zamannya adalah masjid yang terindah dan terbesar di nusantara dengan arsitektur khasnya berupa atap limas. Pelaksanaan pembangunan masjid ini berada dibawah pengawasan arsitek Eropa. Bahan-bahan materialnya seperti batu marmer dan kaca, diimpor dari Eropa. Orang Belanda sangat mengagumi keindahan arsitektur khas dengan sentuhan gaya arsitektur Cina dan teknologi Eropa⁴⁹.

Berdasarkan kesaksian yang dilihat oleh William Marsden⁵⁰, “Masjid kerajaan terletak dibelakang istana. Dilihat dari arsitekturnya, masjid ini tampaknya dibangun oleh orang Eropa. Masjid ini adalah bangunan berbentuk persegi panjang, dengan jendela-jendela berkaca, pilar berornamen dan sebuah kubah”.

Menurut van Sevenhoven⁵¹. “Tempat peribadatan Islam adalah suatu bangunan bersegi empat panjang, dengan tiga buah pintu masuk yang menonjol kemuka dan melalui pintu-pintu ini orang akan naik tangga masuk kedalam masjid; bangunannya dilengkapi dengan tiang-tiang didalamnya dan sebuah kubah. Kaca dan jendela-jendela kaca yang mengelilingi bangunan, menunjukkan kemungkinan, bahwa bangunan ini dibawah seorang arsitek Eropa. Laintainya terbuat dari ubin dan ubin marmer. Ada tangga untuk naik ketempat dimana imam berdiri pada waktu sembahyang; tempat ini ada semacam bilik kecil berbentuk bulat,

⁴⁷ Djohan Hanafiah, *“Dari Kerajaan Sriwijaya Sampai Kesultanan Palembang, Melacak Warisan Sejarah dan Budaya Masyarakat Palembang”*, (Palembang: Kuliah Umum, 2005), hlm. 34.

⁴⁸ William Marsden, *Sejarah Sumatera*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), hlm 433.

⁴⁹ Djohan Hanafiah, *“Dari Kerajaan Sriwijaya Sampai Kesultanan Palembang, Melacak Warisan Sejarah dan Budaya Masyarakat Palembang”*, (Palembang: Kuliah Umum, 2005), hlm. 36.

⁵⁰ William Marsden, *Sejarah Sumatera*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), hlm 433.

⁵¹ Jan Isaac Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. (Jakarta: Bratara, 1971), hlm. 22-23.

tingginya kira-kira 50 kaki. Disisi tembok menara itu ada tangga sampai atas; ditempat itu para perayaan-perayaan Islam rakyat dipanggil untuk mbersembahyang”.

Para imigran Arab terutama dari Handramut mulai berdatangan ke Palembang dalam jumlah yang semakin bertambah sejak abad ke 17. Beberapa ulama Arab berhasil mencapai kedudukan menonjol di istana Kesultanan Palembang pada 1754/5, seorang Sayyid Alidrus diriwayatkan menikahi saudara perempauan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, dan beberapa Sayyid yang tak dikenal namanya memegang kendali pos-pos keagamaan di Kesultanan Palembang⁵².

Sementara itu akibat aturan pemberian gelar yang didasarkan pada garis patrilineal dan matrilineal yang ditetapkan pada masa Sultan Abdulrahman, terjadi inflasi gelar dalam masyarakat Palembang. Untuk mengatasinya, maka Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo mengeluarkan keputusan bahwa gelar hanya diberikan berdasarkan garis keturunan ayah atau patrilineal. Aturan ini dipakai sampai dengan saat ini⁵³.

Untuk meneruskan kekuasaannya, Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo mengangkat putra sulungnya Raden Jailani menjadi putra mahkota. Namun putra mahkota ini pada tahun 1733 diserang sekelompok orang dirumahnya, ia mengamuk melawan musuhnya sehingga ia beserta keluarganya tewas. Karena itu beliau sering disebut Pangeran Ratu Kamuk. Setelah meninggalnya Pangeran Ratu Kamuk, Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo mengangkat adik Raden Kamuk yang bernama Pangeran Adi Kesumo sebagai putra Mahkota⁵⁴.

Masa Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo (1758-1776).

Pangeran Adi Kesumo dinobatkan menjadi Sultan Palembang pada 19 Desember 1758 dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo. Pada masa Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo diadakan kontrak baru, setelah pihak sultan dan VOC merasa kontrak 1755 tidak cocok lagi, maka ditandatangani kontrak baru pada tanggal 15 Juni 1763⁵⁵. Isi dari kontrak ini adalah, “penghapusan pembatasan jumlah 30.000 pikul lada pertahun, tetapi monopoli lada dan timah tetap ditangan VOC; ketentuan orang Belanda atau budak VOC yang melarikan diri kepada orang Palembang harus diserahkan kembali, juga kalau mereka masuk Islam harus dikembalikan”⁵⁶.

Hamper setiap pergantian raja/sultan selalu diadakan pembaharuan kontrak, walaupun mungkin isinya tidak banyak berubah seperti kasus penggantian kontrak 25 Desember 1775 dengan kontrak 25 Desember 1776. Kesempatan lain untuk penggantian atau penambahan

⁵² Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII-XVIII*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 304-305.

⁵³ Syafruddin Yusuf, “*Kesultanan Palembang Darussalam (Dalam Tinjauan Sejarah)*”, (Indralaya: Orasi Ilmiah, 2006), hlm. 10.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 10-11

⁵⁵ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 77.

⁵⁶ Katalog Palembang, No. 41.7 Renover de Contracten met Sultan Seri Ratu Palembang 2 Juni 1722.

kontrak adalah bila terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga sultan atau ketika sultan menghadapi ancaman dari kesultanan lain⁵⁷.

Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo, dibangun beberapa benteng pertahanan diluar kota Palembang yaitu diwilayah Bangka, demi mempertahankan wilayah ini dari serangan bajak laut. Benteng yang dibangun ada dua yaitu Benteng Kuto Seribu dan benteng Kuto Tempilang. Benteng Kuto Seribu adalah benteng tanag yang berbentuk segi delapan tidak beraturan. Benteng ini berada di Desa Lebak Sagu Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok. Benteng ini dibangun Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo dan masyarkat Siantan untuk melawan bajak laut Ilanun dan Bugis⁵⁸.

Benteng Kuto Tempilang didirikan pada tahun 1756 pada masa kekuasaan Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo. Benteng berbentuk persegi panjang dulunya berukuran 450 meter dan lebar 50 meter dan ketebalan dinding benteng 0,6 meter. Arsitek dari pembuat benteng ini adalah Kau Tek dari Cina. Fungsi benteng ini selain sebagai tempat pertahanan dari serangan bajak laut juga untuk menyimpan timah. Pimpinan benteng ini yang terkenal adalah Kapitano yang berasal dari Vietnam. Tokoh lainnya yang pernah berperan dalam benteng ini adalah Panglima Angin yang bernama Daut dan seorang ahli silat dari Cina yang bernama Afek Lang Guan⁵⁹.

Dimasa Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo, muncul pula penulis Palembang yang bernama Kemas Fakhrudin yang mengarang kitab Mukhtasar yang merupakan terjemahan dari Risalah fi al-Tawhid karangan Syekh Raslan al-Dimasyqi yang diperluas dengan komentar dari syarah Zakaria al-Ansyari⁶⁰.

Masa Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803).

Penguasa Palembang, terutama Sultan Muhammad Bahauddin selalu memperhatikan keamanan diperairan Sungai Musi dan sekitarnya dari serangan perompak. Oleh karena itu para pedagang asing singgah di Palembang karena disitu tidak banyak gangguan keamanan dan terdapat barang dagangan yang laku dipasaran dunia, seperti lada dan timah. Disamping itu letak pelabuhan Palembang cukup strategis, tidak terlalu jauh dari Selat Bangka⁶¹.

Kesultanan Palembang memiliki sumber keuangan dari perdagangan timah, lada dan hasil hutan. Tambang timah terdapat di Pulau Bangka yang dikelola oleh orang-orang Melayu dan Cina. Sultan Muhammad Bahauddin memberikan subsidi, upah, dan biaya hidup kepada para penambang, tetapi timah yang dihasilkan dibeli oleh sultan dengan harga yang sudah ditentukan. Perdagangan timah di daerah Kesultanan Palembang mengalami kemajuan yang cukup ramai. Oleh sebab itu Sultan Muhammad Bahauddin mengeluarkan uang pitis yang

⁵⁷ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm 78.

⁵⁸ Dharmansyah, *"Bajak Laut di Perairan Kepulauan Riau, Bangka, dan Belitung Abad XVIII-XIX"*, Siddhayatra, No.1 Vol. 9, 2004, hlm 46.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 47.

⁶⁰ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 93.

⁶¹ Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*, (Jakarta: Ombak, 2013), hlm. 50.

dibuat di Mentok. Nilai tukarnya, yaitu 2000 pitis sama dengan 2,5 gulden. Uang ini dapat ditukarkan dengan uang perak atau uang logam jika dipergunakan di luar Nusantara⁶².

Sementara itu, lalu lintas perdagangan dan pelayaran yang dilakukan di Pelabuhan Palembang semakin bertambah ramai. Pada bulan Oktober 1790-Agustus 1792 terdapat 374 kapal yang keluar masuk, yaitu kapal-kapal dari pulau-pulau lain di Nusantara, VOC, Cina, dan Arab yang sering berlabuh di Palembang, namun demikian kapal yang dimiliki oleh VOC hanya berjumlah 20 buah yang selama periode itu mengunjungi pelabuhan Palembang⁶³.

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin ini penyakit VOC yang kronis karena kerugian yang diderita oleh kongsi dagang ini membuat tidak mampu lagi untuk membeli komoditas perdagangan dengan Palembang. Dengan kondisi demikian, VOC harus menjalankan sistem hutang untuk mendapatkan timah namun hal ini ditolak oleh Sultan Muhammad Bahauddin. Sultan Muhammad Bahauddin tetap mempertahankan penjualan secara tunai sesuai dengan kontrak-kontrak dagang antara Palembang dan VOC. Maraknya perdagangan gelap disinyalir oleh para pejabat VOC di Belanda sebagai penyebab VOC semakin terpuruk. Perdagangan gelap ini dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC dan para pedagang Palembang⁶⁴.

Masalah yang lain ialah bajak laut. Residen VOC di Palembang telah berulang kali mengajukan protes kepada Sultan Muhammad Bahauddin mengenai hal tersebut. Sesungguhnya, pihak sultan telah berulang kali menghalau bajak laut dari kawasan perairan Palembang. Agaknya, tindakan ini belum mampu mengatasi perompakan di laut. Akibatnya, Sultan Muhammad Bahauddin hanya mampu menjual 4280 pikul timah dan 500 pikul lada ke Cina. Hasil yang diperoleh dari penjualan timah yang disetorkan ke VOC hanya sebesar 16.000 ringgit. Terbatasnya timah yang diperoleh disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja untuk berkerja di tambang⁶⁵.

Sultan Muhammad Bahauddin, ketika masih menjadi Pangeran Ratu telah menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap ilmu agama dan dimasanya muncul pengarang Palembang yang sangat terkenal Abdul Shomad al-Palimbani. Tulisan Abdul Shomad al-Palimbani tersebar luas tidak hanya di Nusantara, tetapi juga Timur Tengah⁶⁶. Sultan Muhammad Bahauddin selama berkuasa sempat menentukan putra mahkota calon penggantinya, tetapi tidak sempat untuk menobatkannya sebagai penggantinya. Sultan Muhammad Bahauddin semasa hidupnya mengangkat putra sulungnya Raden Muhammad Hasan sebagai Pangeran Ratu. Ketika ia meninggal tahun 1804, maka Raden Muhammad Hasan Pangeran Ratu dinobatkan sebagai sultan Palembang dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II⁶⁷.

⁶² *Ibid*, hlm. 52.

⁶³ William Marsden, *Sejarah Sumatera*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), .hlm. 198.

⁶⁴ Farida, *Perebutan Kekuasaan di Kesultanan Palembang (1804-1825)*, (Disertasi Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta: tidak di terbitkan, 2012), hlm. 59.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 62.

⁶⁶ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 93.

⁶⁷ Syafruddin Yusuf, *"Kesultanan Palembang Darussalam (Dalam Tinjauan Sejarah Politik)"*, (Indralaya: Orasi Ilmiah, 2006), hlm. 11.

Kesimpulan

Setelah kita melihat sejarah panjang para raja dan sultan di Kesultanan Palembang, kerajaan ini mampu berkembang dengan baik sebelum masuknya VOC ke Palembang. Masalah yang dihadapi pada saat Palembang masih berbentuk kerajaan adalah serangan dari Kesultanan Banten yang berusaha untuk memasukkan wilayah Palembang ke dalam wilayah kekuasaannya. Lampung yang berhasil direbut oleh Kesultanan Banten membuat wilayah ini menjadi wilayah yang kaya akan tanaman lada dan menambah pundi-pundi kekayaan Kesultanan Banten. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Palembang yang juga melibatkan keluarga kerajaan, yang konflik ini mampu diatasi sendiri.

Awal Kesultanan Palembang dibentuk pada masa pemerintahan Sultan Abdulrahman, suasana semakin tidak nyaman lagi dengan berkuasanya pihak VOC di Palembang, dilanjutkan dengan sultan-sultan berikutnya, kekuasaan VOC telah begitu menggurita sehingga untuk menentukan calon raja pun mesti dengan persetujuan VOC. Puncaknya ialah setelah pendapatan kesultnan dari timah dan lada yang telah berpindah ke tangan Belanda dan Inggris sehingga menyeret kesultanan ini ke dalam perang untuk menghadapi Inggris dan Belanda ditambah dengan perang saudara yang memang sengaja diciptakan oleh bangsa ini.

Warisan budaya dari Kesultanan Palembang ini, sampai saat ini masih dapat kita lihat, hamper sebagian besar makam-makam baik raja maupun sultan masih dapat kita temukan di Kota Palembang, juga dapat kita lihat dari tinggalan masjid yang dibangun dan keraton yang menjadi tempat tinggal sultan, juga banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Palembang masih tersimpan di beberapa negara eropa dan di Indonesia yang masih dapat kita lihat.

Daftar Pustaka

Arsip Nasional Republik Indonesia

Katalog Palembang, No. 41.6 Renovasi de Contracten met de Koningen van Palembang dee 1622, 1678, 1679, en 1684 det 25 Januari 1691.

Katalog Palembang, No. 41.7 Renover de Contracten met Sultan Seri Ratu Palembang 2 Juni 1722.

Katalog Palembang, No. 41.8 Contrac Palembang 10 September 1755

Buku/Jurnal

Azra, Azyumardi. 2004. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII-XVIII. Bandung: Mizan.

Dharmansyah. 2004. Bajak Laut di Perairan Kepulauan Riau, Bangka, dan Belitung Abad XVIII-XIX. *Siddhayatra, No.1 Vol. 9*.

Faille, P. De Roo La. 1071. Dari Zaman Kesultanan Palembang. Jakarta: Bhratara.

Farida. 2012. Perebutan Kekuasaan di Kesultanan Palembang (1804-1825). Jakarta: Disertasi tidak di terbitkan.

Hanafiah, Johan. 2005. Dari Kerajaan Sriwijaya Sampai Kesultanan Palembang, Melacak Warisan Sejarah dan Budaya Masyarakat Palembang. Palembang: Kuliah Umum.

- , 2007. Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Sumatera Selatan, Palembang: Balai Arkeologi Palembang.
- Purwati, Retno, 2002. Candi Angsoko dan Kesenjariannya. *Siddhayatra, No.1 Vol. 7*.
- , 2004. Konflik Elit Politik Pada Masa Kerajaan dan Kesultanan Palembang. *Siddhayatra No. 1 Vol. 9*.
- Rahim, Husni. 1998. Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang. Jakarta: Logos.
- Marsden, William. 2013. Sejarah Sumatera. Depok: Komunitas Bambu.
- Reid, Anthony. 2014. Sumatera Tempo Dulu, Dari Marcopolo Sampai Tan Malaka. Depok: Komunitas Bambu.
- Sevenhoven, Jan Issac van. 1971. Lukisan Tentang Ibukota Palembang. Jakarta: Bratara.
- Supriyanto, 2013. Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864. Jakarta: Ombak.
- Utomo, Baambang Budi. 2011. Atlas Sejarah Islam Indonesia Masa Islam. Jakarta: Kemdikbudpar.
- Yusuf, Syafruddin. 2006. Kesultanan Palembang Darussalam (Dalam Tinjauan Sejarah Politik). Indralaya: Orasi Ilmiah.